BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perumahan dan Permukiman

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Setiap manusia dari golongan mampu hingga golongan yang tidak mampu secara ekonomi tetap membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. Pengembangan Kecamatan Seberang Ulu I sebagai kawasan penyangga lingkungan terdapat banyak faktor yang akan mempengaruhi dan perlu dipertimbangkan baik dari segi ketersediaan lahan maupun kebutuhan lahan, akan tetapi dalam studi ini dibatasi pada penentuan optimalitas pada sisi ketersediaan karena dipengaruhi kuantitas dari komoditas secara total dalam kebutuhan ruang, misalnya ketersediaan ruang dan teknologi, ruang yang ada berpotensi menjadi fungsi tertentu dan lebih dikhususkan pada kemampuan sumber daya lahan yang akan digunakan sebagai faktor pendukung keseimbangan fungsi Kota Palembang.

Oleh karenanya daerah Kecamatan Seberang Ulu I memerlukan perencanaan yang sesuai dalam pengembangan dan pembangunan dimasa mendatang. Contohnya dengan mempersiapkan beberapa alternatif dalam pemanfaatan ruangnya terutama dihubungkan dengan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan ketersediaan dan kesesuaian lahan.

2.1.1 Pengertian Perumahan dan Permukiman

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Permukiman merupakan suatu kesatuan wilayah dimana perumahan berada, sehingga suatu lokasi dan lingkungan perumahan tersebut sebenarnya tidak akan pernah lepas dari permasalahan dan lingkup keberadaan suatu permukiman. Dan karena itu sebaiknya sebelum dilakukan pengembangan perumahan terlebih dahulu diteliti keadaan dan kondisi permukiman dimana perumahan itu akan di bangun. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan melalui studi kelayakan agar keberadaan perumahan tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan operasionalnya dikemudian hari dapat mendukung arah dan laju perkembangan permukiman yang direncanakan (Sastra, 2006: 37).

2.1.2 Kebijaksanaan Perumahan dan Permukiman

Menurut Undang-Undang Permukiman Nomor 1 Tahun 2011, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni dan permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk:

1. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
2. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi MBR.

3. Meningkatkan daya guna dan hasil sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.
4. Memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, social, dan budaya.
6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur adalah lingkungan yang memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan lahan, pemilikan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana serta sarana lingkungannya. Sementara itu definisi dari lingkungan permukiman kumuh adalah lingkungan permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuninya.

2.1.3 Rasio Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah harus memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan secara keseluruhan. tidak semua lahan potensial yang ada harus dan boleh untuk digunakan sebagai lahan pengembangan kegiatan fisik kota. Perlu adanya lahan-lahan hijau yang difungsikan sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan wilayah secara keseluruhan. Pola hijau dalam pengembangan wilayah bertujuan untuk mendapatkan suatu keserasian, keseimbangan, keteduhan dan kenyamanan lingkungan secara keseluruhan. Pola penggunaan lahan wilayah ditetapkan dengan rasio pengembangan 80:20 (*Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang pedoman penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan*), artinya penggunaan lahan untuk pembangunan fisik wilayah maksimal 80% dari keseluruhan lahan potensial yang ada sedangkan 20% dari luas wilayah potensial dipertahankan sebagai lahan terbuka hijau sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan.

Sementara itu, pengaturan pengembangan kawasan permukiman lebih teknis diatur melalui SKB Mendagri, Menteri PU dan Menpera nomor 648-384/KPTS/1992 tentang "Pedoman Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Dengan Lingkungan Hunian Yang Berimbang" ditetapkan bahwa rasio perbandingan pengembangan kawasan permukiman dengan kawasan fasilitasnya adalah 60:40. Artinya kebutuhan lahan sarana prasarana dan fasilitas umum kota adalah 40% dari luas lahan yang dapat dikembangkan, sedangkan kebutuhan lahan efektif permukiman adalah sebesar 60%. Ketentuan luas dasar bangunan pada kawasan permukiman kemudian diperjelas berdasarkan uraian sebagai berikut:

1. Permukiman dengan tingkat kepadatan rendah, koefisien penghijauan ditetapkan 0,4 dengan demikian daerah yang harus dihijaukan minimum 40% dari luas tanah (persil) yang ada.
2. Permukiman dengan tingkat kepadatan sedang sampai rendah koefisien penghijauan ditetapkan 0,3 dengan demikian daerah yang harus dihijaukan minimum 30% dari luas tanah (persil) yang ada.
3. Permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi, koefisien penghijauan ditetapkan 0,2 dengan demikian daerah yang harus dihijaukan minimum 20% dari luas tanah (persil) yang ada.

2.2 Konsep dan Peran SIG

Geographic Information System (GIS) atau system informasi berbasis pemetaan dan geografi adalah sebuah alat bantu manajemen berupa informasi berbantuan computer yang berkait erat dengan system permetaan dan analisi terhadap sesuatu serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi. Teknologi GIS mengintergrasikan operasi pengolahan data berdasarkan kebutuhan, serta analisis statistik dengan menggunakan visualisasi yang khas serta berbagai keuntungan yang dapat digunakan melalui analisis geografis melalui gambar peta.

SIG dapat menampung data dalam bentuk lokasi yang mempunyai koordinat maupun sifat dari lokasi (attribute). Sifat ini terdiri dari dua macam yaitu atribut sebaran (*qualitative attribute)* dan atribut nilai (*quantitative attribute).* SIG membantu

dalam merencanakan tata ruang karena keluaran analisis SIG dapat berupa peta, tabel, grafik, diagram bahkan penampang tiga dimensi.

2.3 Teori mengenai Lahan

2.3.1 Evaluasi Lahan

Evaluasi lahan adalah suatu proses menduga potensi sumberdaya lahan untuk berbagai penggunaanya. Kerangka dasar evaluasi lahan adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan suatu penggunaan lahan tertentu dengan sifat atau kualitas lahan yang bersangkutan. Kecocokan antara sifat fisik lingkungan dari suatu wilayah dengan persyaratan penggunaan yang dievaluasi memberikan gambaran atau informasi bahwa lahan tersebut potensial untuk dikembangkan (Rayes, 1995: 74). Evaluasi lahan sendiri merupakan sarana untuk membandingkan penggunaan lahan tertentu dengan sifat dan kualitas yang sesuai untuk penggunaan lahan.

2.3.2 Lahan

Lahan adalah bagian dari bentang alam atau suatu lingkungan fisik meliputi tanah, iklim, topografi, hidrologi dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Menurut PERMEN LH no 17 tahun 2009 lahan merupakan suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfit, atmosfir, tanah, geologi, relief, hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan kini, yang bersifat mantap atau mendaur.

2.3.3 Karakteristik Lahan

Karakteristik lahan adalah sifat-sifat lahan yang dapat diukur atau ditaksir besarnya seperti lereng, curah hujan, tekstur tanah, kedalaman efektif dan sebagainya. Satu jenis karakteristik lahan dapat berpengaruh terhadap lebih dari satu jenis kualitas lahan (Hardjowigeno, 2001:22). Karakteristika lahan sendiri di gunakan untuk mengetahui ciri-ciri atau sifat lahan.

2.3.4 Kualitas Lahan

Kualitas lahan adalah sifat-sifat atau attribute yang bersifat kompleks dari sebidang lahan atau secara sederhana merupakan sifat-sifat lahan yang dapat diukur langsung mempunyai pengaruh nyata terhadap kesesuaian lahan untuk penggunaan-penggunaan tertentu. Satu jenis kualitas dapat disebabkan oleh beberapa karakteristik

lahan (Hardjowigeno, 2001:22). Kualitas lahan digunakan untuk melihat kesesuaian lahan yang berada di kawasan tertentu sudah memiliki kemampuan untuk dimanfaatkan sebagai pengguaan tertentu.

2.3.5 Klasifikasi Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan jenis lahan.

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) dalam tingkat kelas, kemampuan lahan menunjukkan kesamaan dari besarnya faktor-faktor penghambat. Semakin tinggi kelasnya, kualitas lahannya semakin buruk, berarti resiko kerusakan dan besarnya faktor penghambat bertambah dan pilihan penggunaan lahan yang diterapkan semakin terbatas.

Faktor penentu kemampuan lahan yang di gunakan dalam studi mengacu pada SK Menteri Pertanian No.837/KPTS/1980 dan No. 683/KPTS/1981 yang terdiri dari kelerengan, jenis tanah dan curah hujan. Sebelum dgunakan untuk menilai kemampuan lahan di wilayah penelitian, faktor-faktor tersebut dikelompokan dalam kriteria tertentu dan diberi skor masing-masing. skor masing-masing kriteria dan faktor kemampuan lahan dapat di lihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Kriteria Kelas Kemampuan Fisik Lahan

No	Kriteria	Klasifikasi	Nilai	Bobot
1.	Topografi	1. 0-8%	1	40
		2. 8-15%	2	
		3. 15-25%	3	
		4. 25-40%	4	
		5. >40%	5	
2.	Jenis Tanah	1. Aluvial, Glei, Planosol, Hidromorf, Laterik	1	5
		2. Latosol	2	
		3. Brown Forest Soil, Noncolcic Brown Mediteran	3	
		4. Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik	4	
		5. Regosol, Litosol, Organosol, Rensina	5	
3.	Curah Hujan	1. <13,66 mm/hari	1	5
		2. 13,66-20,77 mm/hari	2	
		3. 20,77-27,7 mm/hari	3	
		4. 27,7-34,8 mm/hari	4	
4.	Peka Erosi	1. Tidak peka erosi	1	20
		2. kurang peka erosi	2	
		3. agak peka erosi	3	
		4. peka erosi	4	

		5. sangat peka erosi	5	
5.	Geologi	1. holosen	1	20
		2. pleistosen	2	
		3. pliosen	3	
		4. miosen	4	
6.	Hidrologi	1. baik	1	10
		2. agak baik	2	
		3. agak buruk	3	
		4. buruk	4	
		5. berlebihan	5	

Sumber: Hasil Telaah dari SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/Um/11/1980, Penyusunan Peta Geologi SNI 13-4691-1998, dan Klasifikasi Kemampuan Lahan Fakultas Geografi UGM, 1991 dalam Pratomo, 200

2.3.6 Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan ialah istilah yang banyak digunakan untuk mengklasifikasikan kemampuan lahan untuk dimanfaatkan/dibudayakan tanpa menimbulkan kerusakan dalam jangka panjang. Kemampuan lahan kadang-kadang diartikan pula sebagai klasifikasi lahan yang didasarkan pada factor-faktor penghambat yang merusak (Hardjowigeno, 2001:22).

Kemampuan lahan adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topofrafi, drainase dan kondisi lungkungan hidup lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan (PERMEN LH no 17 tahun 2009 : 2)

Dengan menggunakan kriteria dari kelas kemampuan fisik, Kemampuan lahan dinilai dengan cara menjumlahkan skor dari setiap faktor. Maka berdasarkan perhitungan rumus Sudjanan dalam Pratomo (2009) tersebut maka diketahui interval dengan tiga kelas kemampuan lahan sebagaimana terdapat pada klasifikasi kelas berikut ini :

$$i = \frac{Nilai\ tertinggi - Nilai\ terendah}{k}$$

dengan:
i = kelas interval
k = banyak kelas

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41/Prt/M/2007 kawasan lindung ialah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya ialah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan perkotaan ialah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Menurut SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/Um/11/1980 Kriteria kawasan hutan lindung adalah:

a. Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng 1apangan, jenis tanah, intensitas hujan yang melebihi nilai skor 175, dan atau;
b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau;
c. kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

2.3.7 Kesesuaian Lahan

Kesesuaian atau kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Beberapa ahli mengemukakan bahwa istilah "capability" dan suitability" merupakan dua istilah yang mempunyai arti sama sehingga saling menggantikan. Namun pengertian yang umum dipakai saat ini adalah kemampuan lahan merupakan potensi lahan untuk jenis penggunaan tertentu (Hardjowigeno, 2001:22).

2.4 Teori Kependudukan

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Misalnya pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1995 ke tahun 2000 adalah perubahan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1995 sampai 2000.

Kegunaan dari pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Misalnya pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 1995 ke tahun 2000 adalah perubahan jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1995 sampai 2000.

Kelahiran dan perpindahan penduduk disuatu wilayah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Sedangkan kematian menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau negara dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk awal (misal P0) dengan jumlah penduduk dikemudian hari (misal Pt). Tingkat pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus secara geometrik yaitu dengan menggunakan dasar bunga-berbunga (bunga majemuk).

Dari rumusan yang ada di www.datastatistik-indonesia.com dengan rumus pertumbuhan geometrik, angka pertumbuhan penduduk (rate of growth atau r) sama untuk setiap tahun, rumusnya:

$$P_t = P_0(1+r)^t$$

Dimana

P0 adalah jumlah penduduk awal

Pt adalah jumlah penduduk t tahun kemudian

r adalah tingkat pertumbuhan penduduk

t adalah jumlah tahun dari 0 ke t.

2.5 Teori Kebutuhan Rumah

2.5.1 Kebutuhan Rumah

Kebutuhan akan perumahan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat objektif. Pengertian kebutuhan terkait dengan adanya masalah akan pemenuhan kebutuhan pokok manusia akan rumah sebagai tempat tinggal dan berlindung. Produk rumah disini apabila dilihat dalam skala kebutuhan menurut Maslow merupakan kebutuhan yang paling dasar, terkait dengan perlindungan manusia (Sastra, 2006: 78).

Pertumbuhan penduduk di hampir setiap wilayah selalu bertambah. Pertambahan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan akan rumah sebagai kebutuhan dasar untuk tempat tingga. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan untuk memperhitungkan kebutuhan akan rumah.

2.5.2 Strategi Pengembangan Kawasan Perumahan

Melihat adanya masalah pertumbuhan daerah /wilayah perbatasan yang tidak terkendali akibat perkembangan daerah perumahan yang pesat, maka diperlukan strategi penanganan pembangunan kawasan perumahan yang dapat mengatur dan menampung kegiatan pembangunan perumahan di daerah kota, khususnya pada kota Metropolitan dan kota besar. Pembangunan kawasan perumahan dalam skala besar merupakan salah satu ide yang cukup baik untuk menangani masalah perkembangan daerah perumahan didaerah pinggiran kota (C. Djemabut Blaang, 1986). Pembangunan ini melibatkan semua sektor lembaga pembangunan perumahan, sektor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor perorangan. Dalam pembangunan perumahan ini akan tercakup suatu lingkungan perumahan semua kategori masyarakat dari golongan berpendapatan rendah sampai tinggi.

Untuk pembangunan kawasan permukiman di daerah lahan rawa yang telah di konversi menjadi kawasan permukiman yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan resapan tetap memiliki fungsi sebagai kawasan resapan dengan cara rumah yang di rancang memiliki system panen hujan.

2.6 Studi-Studi Terdahulu

Studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan arahan pengembangan kawasan permukiman maupun kesesuaian lahan yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Kajian Ketersediaan dan Kesesuaian Lahan Untuk Pengembangan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Seberang Ulu I diantaranya ialah penelitian yang dilakukan Amir Mahmud dalam skripsi yang berjudul Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman berdasarkan Ambang Batas Wilayah Kabupaten Bangkalan, Muji Esti Wahyudi dalam skripsi Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Berdasarkan Kesesuaian Lahan dan Awan Senjahari dalam skripsi dengan judul Arahan

pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Ketersediaan Lahan. Endang Febriana dalam skirpsi Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa di Kota Palembang. H. Supli Effendi Rahim dan H. Abdul Halim PKS.Jurnal, Universitas Sriwijaya dalam Jurnal Panen Hujan Di Lahan Rawa Secara Terpadu.

Table 2.2 : Studi- Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Tujuan	Variabel	Teknik analisis	Output
1	Amir Mahmud. 2005,Skripsi, Universitas Brawijaya	Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Ambang Batas Wilayah Kabupaten Bangkalan	Memberikan arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan pendekatan kebijakan, ambang batas wilayah dan kecenderungan pilihan lokasi permukiman baru oleh penduduk	• Ambang batas wilayah • Kebijakan pengembangan wilayah • Guna lahan • Pertumbuhan penduduk	• Analisis kebutuhan lahan permukiman berdasarkan rasio pengembangan wilayah yang seimbang • Metode analisi kebijakan pengembangan wilayah yang didasarkan pada analisis lokasi prioritas oleh masyarakat • Arahan pengembangan lokasi permukiman dilakukan metode superimpose	Arahan Dan Metode Pengembangan Kawasan Permukiman Kabupaten Bangkalan
2	Awan Senjahari. 2007,Skripsi, Universitas Brawijaya	Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Ketersediaan Lahan	Menyusun arahan pengembangan kawasan permukiman di kecamatan krian kabupaten sidoarjo berdasarkan tingkat ketersediaan lahan	• Tingkat kemampuan dan ketersediaan lahan • Kebutuhan lahan permukiman • Lokasi optimal permukiman=	• Klasifikasi kemampuan lahan (klasifikiasi kemampuan lahan fakultas geografi UGM, 1991:14) • Klasifikasi kesesuaian lahan (dinas tata ruang PU cipta karya Provinsi Jawa Timur)	Arahan dan Metode Pengembangan Kawasan Permukiman Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
3	Muji Esti Wahyudi. 2008, Skripsi, Universitas Brawijaya	Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Berdasarkan Kesesuaian Lahan	Menyusun arahan pengembangan kawasan permukiman Kota Samarinda berdasarkan kesesuaian dan ketersediaan lahan.	• Ketersediaan lahan • Perumbuhan penduduk • Kesesuaian lahan	• Analisis tingkat kebutuahan lahan permukiman dengan metode evaluative kuantitatif • Analisis kesesuaian lahan dengan teknik scoring dan superimpose • Analisis kemampuan lahan dengan teknik overlay dan scoring	Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Berdasarkan Kesesuaian Lahan

4	Endang Febriana,2008, Skripsi, Universitas Diponegoro	Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa di Kota Palembang	mengevaluasi peraturan pengendalian yang telah ada dan mengkaji perkembangan pemanfaatan lahan rawa Kota Palembang guna mengetahui arahan dalam pengendalian pemanfaatan lahan rawa di Kota Palembang.	• Perda Rawa, • Kesesuaian lahan • Efektifitas Pengendalian	• menganalisis Karakteristik danm Tipologi Lahan Rawa di Kota Palembang • Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Penggunaan Lahan Rawa • Analisis Arahan Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa • analisis Perubahan Pengunaan Lahan Rawa • Analisis Kinerja Pelaksanaan Perda Rawa dalam Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa	Kinerja Pengendalian Pemanfaatan Lahan Rawa di Kota Palembang
5	H. Supli Effendi Rahim dan H. Abdul Halim PKS.Jurnal, Universitas Sriwijaya	Panen Hujan Di Lahan Rawa Secara Terpadu	bagaimana memanen hujan di areal rawa secara terpadu.	• panen hujan • lahan rawa • permukiman konversi lahan rawa	• analisi areal kawasan rawa yang memiliki kekurangan air bersih • analisi rancangan rumah untuk panen hujan	Panen Hujan Di Lahan Rawa Secara Terpadu